

**Analisis Semiotik antara Lingkungan Binaan dengan Lingkungan Sosial-Politik:
Studi Kasus pada Arsitektur Masjid Provinsi di Indonesia**

A semiotic analysis on the relationship between the built environment and socio-political: the province mosques of Indonesia.

Zuber Angkasa Wazir, Erfan M Kamil
Program Studi Arsitektur, Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. A. Yani. 13 Ulu Palembang, Sumatera Selatan 30263
zuberangkasa5@gmail.com

[Diterima 22/12/2021, Disetujui 7/1/2022, Diterbitkan 8/1/2022]

Abstrak

Artikel ini mempelajari hubungan arsitektur masjid provinsi di Indonesia dengan sistem sosio-politik masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan non-muslim melalui teori semiotika. Hal ini menarik karena adanya latar belakang masyarakat yang majemuk diikuti dengan adanya keanekaragaman arsitektur masjid. Artikel ini memiliki tiga tujuan: pertama, melihat hubungan antara dimensi masjid dan populasi masyarakat muslim di suatu provinsi, kedua, melihat hubungan antara arsitektur masjid dengan jumlah masyarakat muslim dan ketiga, melihat hubungan antara penamaan masjid dengan lingkungan sosio-politik agama. Data kuantitatif 31 masjid provinsi di Indonesia dianalisis menggunakan analisis korelasi dan Fisher's exact test. Penelitian ini berdasarkan data sekunder dari basis data Kementerian Agama Republik Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: luas lahan masjid dan daya tampung masjid berkorelasi dengan jumlah dan proporsi masyarakat muslim di suatu provinsi. Sementara itu, arsitektur atap masjid yang berbentuk pyramidal roof ditemukan di provinsi yang penduduknya mayoritas suku Jawa. Nama masjid yang bersifat asertif ditemukan di provinsi yang jumlah masyarakat muslim dan non-muslim relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak, kondisi lingkungan politik, agama dan etnis memiliki peran penting dalam arsitektur masjid provinsi di Indonesia..

Kata kunci: masjid, semiotika, Indonesia, spherical dom, atap piramid

Abstract

This article examines the semiotic relationship of local mosques in Indonesia with the socio-political system of society, especially Muslims and non-Muslims. The relation is interesting because the diversity of mosque architecture follows a diverse community background. This article has three objectives: first, looking at the relationship between the dimensions of the mosque and the population of Muslims in a province, second, looking at the relationship between mosque architecture and the Muslim population and third, looking at the relationship between the naming of the mosque and the socio-political system. Quantitative data on 31 local mosques in Indonesia were analyzed using correlation analysis and Fisher's exact test. Secondary data from the Indonesian Ministry of Religion database. The results of this study reveal that: the mosque's land area and mosque capacity correlate with the population and proportion of Muslims in a province. Several mosques with pyramid roofs are in areas where the population is predominantly Javanese. Assertive mosque names are in areas where the people of Muslims and non-Muslim are relatively balanced. All of this shows that, consciously or not, the political, religious, and ethnic atmosphere has an essential role in designing local mosques in Indonesia..

Keywords: mosque, semiotics, Indonesia, spherical dome, pyramidal roof

©Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang
p-ISSN 2580-1155
e-ISSN 2614-4034

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang unik secara geografi. Negara ini berbentuk kepulauan dengan beberapa pulau besar, terbentang di sepanjang garis khatulistiwa di tenggara Asia. Keunikan geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan profil demografi yang multi-etnik dan multi-agama. Terdapat sekitar 700 suku bangsa dengan denominasi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang signifikan dalam sejumlah titik. Islam merupakan agama mayoritas. Walau demikian, karena bentuk geografis tersebut maupun kenyataan bahwa Islam bukanlah agama asli Indonesia, variasi dari berbagai pengaruh Islam dapat ditemukan di tempat-tempat berbeda di negara ini. Pengaruh ini dapat dipahami jika kita membagi geografi Indonesia ke dalam pembagian administratif.

Secara historis, pada awalnya negara Indonesia terdiri dari delapan provinsi. Dalam perkembangannya, sekarang Indonesia telah memiliki 34 provinsi. Secara umum, provinsi-provinsi di wilayah tenggara dan timur Indonesia berpenduduk yang beragama Islam (Muslim) lebih sedikit dibanding dengan di wilayah Barat, demikian juga dengan wilayah di pedalaman Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

Dapat dipahami bahwa dalam negara majemuk seperti ini, konflik antar agama dapat terjadi, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki penduduk mayoritas yang berbeda agama. Dalam beberapa hal, pertentangan ini dapat membawa pada masalah politik. Sebagai contoh pada pembentukan dua provinsi baru: Gorontalo dan Maluku Utara, disebabkan oleh perbedaan pemeluk agama. Mayoritas pemeluk agama di Gorontalo dan Maluku Utara adalah Islam, berbeda dengan provinsi induknya, Sulawesi Utara dan Maluku. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana provinsi Sulawesi Utara dan Maluku sebelum pemisahan mengalami ketegangan geografis antar pemeluk agama mayoritas yang berada dalam wilayah berbeda dalam satu provinsi tersebut. Dalam kasus Sulawesi Utara adalah antara barat dan timur, sementara dalam kasus Maluku adalah antara utara dan selatan.

Pada era pemerintahan presiden Soeharto, pemerintah menawarkan solusi bahwa urusan agama dikelola oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa kesalahan dalam pengelolaan urusan agama dapat mengakibatkan konflik yang mengancam pembangunan. Salah satu langkah strategis pemerintah melakukan pengelolaan urusan agama adalah langkah arsitektural, yaitu dengan menyandingkan beberapa rumah ibadah dalam satu kompleks: Masjid Nasional Istiqlal berdampingan dengan Gereja Kathedral Jakarta merupakan contoh yang sangat fenomenal. Contoh serupa dapat ditemukan di banyak daerah lainnya di Indonesia.

Semenjak berakhirnya pemerintahan Soeharto, kebijakan desentralisasi mulai dijalankan dan setiap daerah mulai menonjolkan identitas masing-masing. Kebijakan tersebut tercermin juga dalam urusan agama dan arsitektur, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa provinsi-provinsi mulai menonjolkan arsitektur lokal dengan simbol-simbolnya. Di provinsi yang penduduknya mayoritas Islam, dapat diduga kalau masjid-masjid dibangun secara megah dengan tema-tema yang besar. Sementara di provinsi yang penduduknya minoritas Islam, masjid-masjid dibangun secara sederhana dengan tema-tema toleransi atau persatuan.

Hubungan antara arsitektur dan politik telah diakui sejak lama dalam literatur (Koskinen dan Hush, 2016; Chapman, 2017). Dalam teori semiotika Barthes, setiap representasi baik visual, tekstual, maupun material, akan memiliki makna denotatif dan konotatif (Barthes, 1977). Makna denotatif dapat jelas terlihat dari representasi sementara makna konotatif lebih kompleks dan terkait dengan aspek kultural (Yacobi dan Ventura, 2016). Lebih dari itu, makna tersebut dapat terlekat baik pada signifier (word or symbol) and signified (designed object) (de Saussure, 2011[1916]).

Penelitian yang menghubungkan antara arsitektur Islam dengan politik sebelumnya telah pernah dilakukan oleh Sani (2009) dalam arsitektur Safavid di Iran. Sani (2009) mengeksplorasi bagaimana kekuasaan politik, keyakinan agama, dan identitas

dicerminkan ke dalam bahasa arsitektur oleh dinasti Safavid. Penelitian lainnya oleh Falah (2018) mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan politik dalam arsitektur Kota Najaf, Irak. Studi ini hanya menyorot pada aspek politik negara yang diimplementasikan dalam pembangunan dan modernisasi di Irak. Hal ini sama seperti yang telah dilakukan oleh Ismail dan Rasdi (2010) di Malaysia. Sementara itu, untuk lingkup Indonesia, penelitian lokal di Aceh dilakukan oleh Hasan (2009) untuk memahami politik identitas dalam hubungannya dengan arsitektur Aceh.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang lengkap tentang arsitektur masjid dalam kaitannya dengan politik desentralisasi di Indonesia. Sehingga, menyisakan gap mengenai hubungan antara arsitektur dan politik. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus kepada arsitektur di kawasan Timur Tengah.

Penelitian sekarang akan berfokus pada masjid-masjid provinsi. Kementerian Agama Indonesia membagi tipologi masjid sesuai dengan level administrasi. Tipologi ini mencakup masjid negara (masjid nasional), masjid provinsi (masjid provinsi), masjid kabupaten/kota (masjid agung), masjid kecamatan (masjid besar), dan masjid desa/kelurahan (masjid jami'). Akibatnya, hanya ada satu masjid negara yaitu masjid Istiqlal di Jakarta. Sementara itu, idealnya terdapat 34 masjid provinsi di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada masjid provinsi karena walaupun berada di bawah pemerintah pusat, pemerintah provinsi menjadi titik temu antara pengaruh pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang berada pada level kabupaten/kota. Akibatnya, masjid provinsi akan berusaha menjadi wakil dari Islam, nasionalisme pusat, dan etnosentrisme daerah. Hal ini menjadikan masjid provinsi sebagai sebuah titik kontestansi yang menarik untuk ditelusuri. Sejalan dengan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tipologi masjid-masjid provinsi di Indonesia dalam relasinya dengan politik dalam berbagai level.

Arsitektur Masjid dan Politik

Dalam artikel ini, kami mengartikan politik secara umum sebagai seni untuk meraih kekuasaan. Karenanya, ia tidak sebatas pada kekuasaan administrative saja misalnya sebagai kepala daerah, tetapi juga pada dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Berdasarkan pemahaman ini, upaya untuk menunjukkan kekuasaan satu agama atas agama lain atau ideologi lain, atau satu suku di atas suku lain juga dapat dipandang sebagai manifestasi politik.

Gaya arsitektur Islam adalah sebuah gaya yang sangat fleksibel. Ideologi Islam menempatkan arsitektur secara fungsional tanpa menggariskan aturan yang baku mengenai bentuk dan proporsi. Sejauh tiga prinsip: hasan (fungsional), thoyib (baik), dan jamil (estetika) dipatuhi, maka arsitektur Islam dapat mengambil bentuk apapun (Indrawati, Soetomo, Setioko, Murtini, & Nurhasan, 2016). Larangan yang paling keras dalam praktek arsitektur Islam adalah prinsip anikonisme (Grabar, 2001). Islam melarang penggambaran bentuk makhluk hidup yang bergerak (hewan dan manusia) atas dasar bahwa penggambaran tersebut berpotensi dijadikan idola, mengidolakan sesuatu selain Allah, dilarang dalam Islam. Karenanya, tidak akan ditemukan bentuk patung atau dekorasi bergambar hewan dan manusia pada arsitektur Islam. Sedangkan, karakteristik fisik lain sangat fleksibel hingga gereja dan wihara pun dapat dialihfungsikan sebagai masjid.

Pengutamakan fungsi pada arsitektur Islam memberi fleksibilitas kepada arsitek untuk mendesain bentuk bangunan Islam dengan berbagai gaya. Dengan adanya fleksibilitas ini, arsitektur bangunan Islami dapat menampung desain dengan tema-tema yang bervariasi. Walau bagaimanapun, tema-tema ini tetap terikat pada fungsional bangunan yang secara umum adalah untuk menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berarti seseorang hamba Tuhan yang sekaligus sebagai pengelola yang bijaksana bagi kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Tema-tema seperti

kemewahan, identitas personal, identitas etnik, atau hedonisme, tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tema tersebut tidak diterapkan dalam arsitektur Islam.

Walau begitu, arsitektur Islam, khususnya masjid, berkembang menjadi berbagai gaya yang terikat pada fungsionalitas dan lingkungannya. Gambaran umum bahwa masjid merupakan bangunan yang memiliki spherical dome adalah sebuah representasi dari gaya masjid yang berasal dari Timur Tengah. Masjid pertama umat Islam, Quba, pada awalnya tidak memiliki spherical dome (Taib & Rasdi, 2012). Spherical dome berfungsi untuk menaungi ruang yang luas untuk kebutuhan ritual sekaligus untuk menjadikan bangunan lebih menonjol di lingkungannya, sehingga masyarakat lebih mudah menemukannya. Ketika bangunan di sekeliling masjid sangat padat, keberadaan menara menjadi tanda yang penting untuk menemukan masjid. Hal ini didukung oleh kondisi lahan gurun di Timur Tengah. Pada lingkungan gurun, bahan bangunan kecil dan pendek, sehingga bentuk-bentuk melengkung seperti spherical dome lebih mudah dibuat.

Hal ini berbeda dengan situasi di negara tropis seperti kawasan Asia Tenggara. Kawasan berhutan menawarkan banyak kayu untuk menjadi bahan bangunan. Kayu yang memiliki bentuk kaku tidak dapat dibentuk lengkung. Karenanya, masjid di kawasan Asia Tenggara menggunakan penutup pyramidal roof dengan bahan dasar kayu (Nawawi et al, 2018), terlebih karena pyramidal roof dan spherical dome memiliki *contested acoustic quality* (Kassim et al, 2014). Hal ini pada gilirannya membedakan secara tegas arsitektur masjid di Asia Tenggara dengan Timur Tengah (termasuk India). Pemakaian bahan kayu tidak mengganggu fungsionalitas dari masjid sehingga desain dengan pyramidal roof dapat tersebar luas di Asia Tenggara maupun kawasan kepulauan Indonesia.

Sejalan dengan teori semiotika, fungsionalitas dari masjid-masjid di atas hanya memiliki makna denotative semata. Sedangkan elemen-elemen masjid tersebut dapat memiliki makna yang lebih luas lagi, dapat bermakna religius, dapat pula bermakna sekular, tergantung pada arsiteknya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan pertimbangan ini, kita juga dapat melihat elemen seperti ukuran dan bentuk kubah akan mengandung makna-makna denotatif ini. Luas lahan, ukuran bangunan, tinggi menara, dan bentuk kubah dapat bermakna denotatif seperti kebesaran Islam, identitas provinsi, dan sebagainya. Makna religiusnya, dapat difahami dari tinggi menara. Pada banyak masjid di Indonesia, menara dibuat dengan ketinggian tertentu yang melambangkan aspek-aspek ajaran Islam. Sebagai contoh, menara dapat dibangun dengan tinggi 99 meter untuk melambangkan 99 nama Tuhan, seperti pada Masjid Agung di Jawa Tengah, Masjid Provinsi Al Akbar di Jawa Timur, Masjid Islamic Centre di Kalimantan Timur, dan Masjid Provinsi Al Akbar di Papua Barat. Menara juga dapat dibangun dengan tinggi 114 meter untuk melambangkan jumlah surat dalam Al-Qur'an, seperti pada Masjid Provinsi yaitu Jakarta Islamic Center. Masjid Provinsi yaitu Hubbul Wathan Islamic Centre di Nusa Tenggara Barat memiliki lima menara, empat setinggi 99 m dan satu menara setinggi 114 meter. Pada masjid yang telah tua, seperti Masjid Negara Istiqlal dan Masjid Provinsi di Makassar, menara juga dibangun setinggi 66,66 meter (6,666 cm) dengan maksud melambangkan jumlah ayat dalam al Qur'an. Meskipun jumlah ini salah karena jumlah ayat Al Qur'an sebenarnya 6.236, tetapi ketinggian ini memiliki maksud sebagai simbolisme agama Islam.

Ukuran dan desain spherical dome sebagai signified dari perspektif teori semiotika, ia menjadi elemen yang dapat membawa makna denotasi yang berkaitan dengan aspek politik. Dalam hal ini, ukuran bangunan yang besar dan mewah dapat melambangkan kekuasaan atau ambisi yang besar. Sebaliknya, ukuran bangunan yang kecil akan berhubungan dengan posisi minoritas di masyarakat. Boender (2018) mengkaji sejumlah masjid di Belanda dan menemukan bahwa banyak masjid yang dibangun di tanah bekas bangunan, termasuk tanah bekas gereja, bahkan tanah bekas kuburan.

Jika hubungan antara ukuran bangunan dan makna denotatif terbentuk, maka, masjid dengan makna ini hanya dapat tumbuh di lokasi-lokasi dengan sejumlah besar umat Islam. Kita bisa melihat bahwa akan ada korelasi antara ukuran masjid dan ukuran

populasi Muslim di suatu provinsi. Karena alasan ini, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa:

H1: Ukuran masjid berkorelasi dengan jumlah dan proporsi Muslim

Spherical dome secara umum dapat dipandang sebagai elemen eksternal dari arsitektur masjid di Asia Tenggara. Seperti telah dibahas sebelumnya, spherical dome merupakan elemen arsitektur masjid di Timur Tengah dan India. Elemen arsitektur di Asia Tenggara adalah pyramidal roof yang terbuat dari kayu. Untuk membedakan antara rumah dan masjid, pyramidal roof pada masjid dibuat beberapa lapis. Ketika masjid-masjid di Asia Tenggara memutuskan menggunakan spherical dome, hal ini dapat bermakna bahwa arsitektur Timur Tengah lebih berpengaruh daripada arsitektur lokal. Faktanya, banyak masjid with spherical dome di Indonesia juga menggunakan simbol bulan bintang pada puncak atap, yang merupakan simbol dari dinasti Usmaniyah, sebuah dinasti Islam terbesar dari Turki. Pada era pemerintahan Soeharto, masjid-masjid yang dibangun oleh pemerintah disebut masjid Pancasila yang menggunakan simbol segilima, ketimbang bulan bintang, di puncak atap masjid, untuk melambangkan ideologi dan pembangunan nasional Indonesia (Priyotomo, 1996). Masjid Pancasila merupakan masjid yang memiliki piramida bersusun dan merupakan adaptasi masjid Jawa ke dalam desain arsitektur masa kini (I. Hasan, 2009). Etnis Jawa adalah etnis mayoritas di Indonesia yang memiliki hegemoni tersendiri dalam politik di Asia Tenggara masa lalu. Berdasarkan asumsi bahwa penutup atas (spherical dome atau pyramidal roof) merupakan pilihan yang mengimplikasikan kekuatan pengaruh Timur Tengah versus lokal, maka dapat diduga kalau masjid-masjid di Jawa akan berusaha mempertahankan pyramidal roof ketimbang spherical dome, sementara masjid-masjid di daerah lain berusaha menggunakan spherical dome. Hipotesis berikut dikemukakan:

H2: Masjid di Kawasan mayoritas etnis Jawa akan menggunakan penutup pyramidal roof ketimbang spherical dome

Pada tingkat signifier, makna denotasi juga dapat ditemukan. Tidak ada standar dalam penamaan masjid. Akibatnya, arsitek bebas memberikan nama bagi suatu masjid. Nama-nama ini berbeda dengan nama masjid bermakna konotatif seperti masjid batu, masjid kayu, atau masjid kubah emas. Dalam penamaan menggunakan denotasi, nama yang dipilih dapat saja mencerminkan makna yang mencerminkan kekuasaan atau makna lainnya. Studi menunjukkan bahwa penamaan sesuatu dapat memiliki elemen politik di dalamnya (Azaryahu dan Kook, 2002). Ketika populasi umat Islam berjumlah besar, akan wajar jika nama yang diberikan juga mencerminkan kebesaran. Sementara ketika populasinya sedikit, dimana Islam menjadi minoritas, nama masjid akan berusaha moderat dan bahkan mencerminkan kesederhanaan, agar tidak dipandang sebagai perlawanan terhadap mayoritas. Pada posisi populasi umat Islam dengan non-Islam seimbang, masjid akan menggunakan nama yang relatif defensif guna mempertahankan identitasnya. Pada Gambar 1, kami mengklasifikasikan provinsi ke dalam tiga kelompok: provinsi dengan mayoritas mutlak (> 70% populasi umat Islam), provinsi dengan mayoritas relatif (50-70% populasi umat Islam), dan provinsi dengan minoritas (<50% populasi umat Islam). Berdasarkan argumen bahwa nama dapat mencerminkan kekuasaan, maka dapat ditarik hipotesis berikut:

H3: Masjid di provinsi yang mayoritas mutlak akan menggunakan nama yang mencerminkan kekuasaan, masjid di provinsi mayoritas relatif akan menggunakan nama yang mencerminkan konflik, dan masjid di provinsi minoritas akan menggunakan nama yang mencerminkan kebersamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dalam mengumpulkan maupun menganalisis data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia (Kementerian Agama, 2019). Basis data ini mengandung data spesifik masjid dan mushola di Indonesia. Data

masjid yang digunakan adalah berdasarkan kategori Masjid Provinsi. Total terdapat 33 masjid provinsi dalam basis data Kementerian Agama.

Pada penelitian kuantitatif ini, variabel terikat adalah populasi dan proporsi umat Islam di setiap provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari Sensus Penduduk Indonesia terakhir, yaitu tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2011).

Variabel bebas dalam penelitian kuantitatif ini mencakup ukuran dan tipe penutup atas. Ukuran terdiri dari tiga indikator yaitu luas lahan, luas bangunan, dan kapasitas jemaah. Tipe penutup atas dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu spherical dome dan pyramidal roof. Jenis-jenis spherical dome kami bagi berdasarkan stratifikasi dan hubungannya dengan sebuah sphere. Klasifikasi ini lebih sederhana dari klasifikasi lain (misalnya Davies & Jokiniemi, 2008).

Pada penelitian kualitatif ini, data nama masjid digunakan untuk menjadi makna yang akan ditafsirkan dalam kaitannya dengan Hipotesis ketiga. Nama masjid dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu nama berbahasa lokal, nama yang berbahasa Arab asertif, dan nama yang berbahasa Arab netral. Metode klasifikasi ini digunakan pula dalam studi di bidang bahasa dan komunikasi (Ndana, 2007). Nama berbahasa lokal mencerminkan kebersamaan karena kelompok muslim dan non-muslim dapat memahaminya dengan mudah. Nama masjid yang berbahasa Arab kemungkinan hanya dapat dipahami oleh umat Islam. Nama yang berbahasa Arab dapat berarti asertif yang mencerminkan aspek-aspek terkait konflik, dan nama yang netral mencerminkan aspek-aspek moral dan keimanan.

Sejalan dengan ini, analisis data kuantitatif menggunakan dua tipe analisis. Pada Hipotesis 1, analisis korelasi menggunakan pendekatan Pearson. Untuk Hipotesis 2 dan 3 menggunakan analisis Fisher's Exact Test (Fisher, 1954) karena kedua data yang dibandingkan adalah data kategorik dengan jumlah sampel yang sedikit. Metode Fisher's Exact Test umum digunakan dalam penelitian-penelitian spasial (Zhang et al, 2012; Zielstra dan Hochmair, 2013; Levy et al, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Data deskriptif tentang masjid-masjid provinsi di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 1. Luas lahan rata-rata masjid adalah 29.316 m² sementara rata-rata luas bangunan masjid adalah 7.077 m². Daya tampung rata-rata adalah 8.888 orang. Tinggi rata-rata minaret adalah 72 meter. Rata-rata sudah berusia 53 tahun dan masjid provinsi tertua adalah Masjid Gedhe Kauman di Yogyakarta (286 tahun), Masjid Provinsi Bandung di Jawa Barat (207 tahun), Masjid Baiturrahman di Aceh (144 tahun), Masjid Al Mashun di Sumatera Utara (113 tahun), dan Masjid Ukhuwwah di Bali (108 tahun). Dari data tersebut terungkap ada tiga provinsi yang tidak memiliki masjid provinsi yaitu Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kalimantan Utara dan Gorontalo adalah dua provinsi baru sehingga belum memiliki masjid provinsi. Pemerintah Gorontalo telah memulai proses perencanaan untuk membangun masjid provinsi sejak tahun 2019 dengan anggaran Rp 562 Milyar (US\$ 40 Million). Sedangkan provinsi Sulawesi Tengah yang telah berdiri sejak tahun 1966 belum diketahui mengapa provinsi ini belum memiliki masjid. Ada dua provinsi yang memiliki dua masjid yaitu Jakarta dan Jawa Tengah. Jakarta memiliki dua masjid provinsi karena statusnya sebagai ibukota negara. Sementara itu, masjid provinsi di Jawa Tengah merupakan pengganti dari masjid lama yang kapasitasnya lebih kecil. Dalam hal ini masjid yang terbaru yang akan disertakan dalam analisis.

Tabel 1. Masjid Provinsi di Indonesia

No	Proviinsi	Masjid	Luas Lahan (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Kapasitas	Type Atap	Usia (2021)
1	Aceh	Baiturrahman (House of Grace)	31.000	4.000	13.000	Ogive	146
2	North Sumatra	Al Mashun (Guarded)	13.200	5.000	1.500	Umbrella	115
3	West Sumatra	Masjid Provinsi Sumatera Barat (Great Mosque of West Sumatra)	40.000	18.000	20.000	Bergonjong	14
4	Riau	An Nur (Light)	80.000	2.500	4.500	Ogive	53
5	Riau Islands	Masjid Provinsi Kepulauan Riau (Great Mosque of Riau Islands)	2.000	1.600	5.000	Hemisphere	21
6	Jambi	Al Falah (Victory)	27.000	6.400	10.000	Hemisphere	50
7	Bengkulu	Baitul Izzah (Worldly Sky)	18.000	1.600	2.000	Hemisphere	42
8	South Sumatra	At Taqwa (Faithful)	1.800	1.000	1.200	Hemisphere	55
9	Bangka Belitung Islands	Tuatunu (name of a village)	10.000	1.444	3.000	Stratified Quarter	13
10	Lampung	Masjid Islamic Center Nurul Ulum (Light of Knowledge)	5.000	2.475	2.500	Hemisphere + Stratified Pyramid	30
11	Banten	Al Bantani (name of an ulema)	28.415	13.685	10.000	Hemisphere + Stratified Pyramid	11
12	West Java	Masjid Provinsi Bandung (Great Mosque of Bandung)	23.448	8.575	12.412	Hemisphere (old : Pyramid)	209
13	Jakarta Capital Special Area	Jakarta Islamic Center	109.000	14.625	20.680	Hemisphere	20
14	Jakarta Capital Special Area	KH Hasyim Asy'ari (name of an ulema)	24.000	16.985	12.500	Single Pyramid	7
15	Central Java	Baiturrahman (House of Grace)	4.750	3.000	4.500	Stratified Pyramid	47
16	Central Java	Masjid Agung Jawa Tengah	100.000	7.699	15.000	Hemisphere + Pyramid	20
17	Yogyakarta Special Area	Masjid Gedhe Kauman (Moslem Great Mosque)	16.000	2.578	1.500	Stratified Pyramid	288
18	East Java	Al Akbar (Great)	112.000	28.509	59.000	Ogive	21
19	Bali	Ukhuwwah (Brotherhood)	1.360	625	200	Stratified Pyramid	110
20	West Southeast Islands	Hubbul Wathan (Loving Country) Islamic Centre	10.000	1.500	1.000	Hemisphere	7
21	East Southeast Islands	Nurussaadah (Light of Happiness)	3.419	924	5.000	Ogive	59
22	West Kalimantan	Mujahidin (Warriors)	64.000	38.000	9.000	Quarter	42
23	Central Kalimantan	Darussalam (Safe Country)	50.000	3.359	10.000	Hemisphere (old : Pyramid)	37
24	South Kalimantan	Sabilal Muhtadin (Way for the guided people)	100.000	5.250	15.000	Almost Flat	47
25	East Kalimantan	Masjid Islamic Center	120.000	43.500	10.000	Quarter	20
26	North Sulawesi	Ahmad Yani (name of a hero)	7.799	2.572	3.220	Hemisphere	60
27	West Sulawesi	Al Ikhlas (Sincere)	100	56	100	Single Pyramid	14
28	South Sulawesi	Masjid Provinsi Makassar	13.912	10.500	10.000	Hemisphere	73
29	Southeast Sulawesi	Al Kautsar (a river in Paradise)	30.000	2.475	7.000	Hemisphere	39
30	North Maluku	Al Munawwar (smart)	10.000	3.562	9.500	Hemisphere	11
31	Maluku	Al Fatah (victory)	5.000	2.200	10.000	Hemisphere	58
32	West Papua	Al-Akbar (Great)	1.400	1.000	1.000	Ogive	21
33	Papua	Baiturrahim (House of Mercy)	5.635	4.010	4.000	Hemisphere	47

(Sumber: Kementerian Agama, 2019); type atap diperoleh dari pengamatan gambar masjid.

Hasil analisis korelasi ditunjukkan pada Tabel 2. Ukuran lahan berkorelasi signifikan baik dengan persentase maupun jumlah umat Islam. Menariknya, tidak ditemukan adanya korelasi yang signifikan antara luas bangunan dengan jumlah umat

Islam atau proporsi umat Islam di satu provinsi. Korelasi hanya terjadi antara daya tampung dengan jumlah populasi. Walaupun daya tampung adalah parameter dari luas bangunan, daya tampung lebih bersifat internal. Ia akan menjadi eksternal apabila daya tampung tersebut menyebabkan penambahan tempat sholat. Walau bagaimanapun, parameter daya tampung tetap dapat menjadi indikator ukuran eksternal karena penambahan tempat sholat akan menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan. Jika ditetapkan satu orang harus disediakan ruang 1 x 1 meter untuk sholat, maka untuk sejumlah luas bangunan masjid tidak akan mampu menampung sejumlah jemaah. kondisi ini menjelaskan mengapa tidak ada korelasi antara luas bangunan masjid dengan populasi muslim, tetapi ada korelasi antara daya tampung dengan populasi. Karena alasan ini, secara umum Hipotesis 1 dapat diterima.

Tabel 2. Hasil Korelasi

Size Parameter	Moslem Population	Moslem Proportion
Land Area	0,415*	0,357*
Building Area	0,262	0,160
Capacity	0,616**	0,284

Note: ** significant at the 0.01 level; * significant at 0.05 level

Pada Hipotesis kedua, Penulis membandingkan bentuk atap masjid yang ada di Jawa dengan di luar Jawa. Walaupun hanya dibagi menjadi dua kelompok, ada sejumlah variasi pada atap masjid. Sebagai contoh, terdapat bentuk kombinasi dimana pyramidal roof menjadi tempat berpijak bagi spherical dome. Terdapat pula masjid dengan spherical dome tetapi disusun seperti susunan pyramidal roof. Variasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Type Penutup Atap

Dome	N	Pyramid	N
1/8 Sphere (almost flat)	1	Bergonjong	1
1/2 Sphere (hemisphere)	13	Single Pyramid	2
3/4 Sphere (Ogive)	5	Stratified Pyramid	2
1/4 Sphere (Quarter)	2	Single Pyramid with Hemisphere	1
Stratified Quarter	1	Stratified Pyramid with Hemisphere	2
Umbrella	1		

Terdapat satu tipe pyramidal roof yang berbeda dari tipe lainnya yang disebut tipe bergonjong. Bergonjong merupakan tipe pyramidal roof khusus dari Sumatera Barat. Pada arsitektur rumah tinggal, tipe bergonjong disusun seperti pelana, sementara pada Masjid Provinsi di Sumatera Barat, pyramidal roof ini disusun ke empat arah sehingga membentuk pyramidal roof terbalik.

Hasil analisis menggunakan Fisher's Exact Test menunjukkan nilai signifikan ($p=0,026 < 0,05$) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil ini menunjukkan bahwa masjid dengan spherical dome cenderung berada di luar Jawa sementara di Jawa, masjid memiliki kecenderungan menggunakan pyramidal roof. Sejalan dengan ini, maka Hipotesis 2 diterima bahwa masjid di wilayah mayoritas etnis Jawa akan menggunakan penutup pyramidal roof ketimbang spherical dome.

Tabel 4. Tes untuk Hipotesis 2

	Roof Type		
	Dome	Pyramidal	
Outside Java	21	4	25
Java	2	4	6
Total	23	8	31
Fisher's Exact Test			
Exact.Sig (2-sided)	0,026		

Dari hasil analisis tentu saja masih ditemukan deviasi yaitu pada kasus Masjid Agung di Sumatera Barat yang memiliki atap pyramidal terbalik sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Begitu pula pada tabel 4 menunjukkan ada empat masjid dengan atap pyramidal di luar Jawa, sementara di Jawa terdapat dua masjid dengan spherical dome. Kedua masjid spherical dome yang ada di Jawa adalah Masjid Agung Bandung di Jawa Barat dan Masjid Al Akbar di Jawa Timur. Menariknya, masjid Agung Bandung sebenarnya adalah bangunan baru. Bangunan lama memiliki pyramidal roof, bukan spherical dome. Hal ini juga berlaku pada Masjid Darussalam di Central Kalimantan, bangunan lama memiliki pyramidal roof tetapi kemudian diganti dengan spherical dome.

Di sisi lain, ada empat masjid di luar Jawa yang memiliki pyramidal roof. Selain Masjid Provinsi di Sumatera Barat, terdapat pula Masjid Islamic Center di Lampung, masjid Al Ikhlas di Sulawesi Barat, dan Masjid Ukhuwwah di Bali. Masjid Al Ikhlas di Sulawesi Barat memiliki atap berbentuk pyramidal roof, hal ini dapat dipahami karena masjid tersebut berukuran kecil dan berada di wilayah provinsi yang baru. Di masa yang akan datang masjid ini kemungkinan dipugar menjadi lebih besar dan akan bernasib sama dengan Masjid Agung Bandung dan Masjid Al Akbar. Sementara itu, masjid Islamic Center Nurul Ulum dan Masjid Ukhuwwah yang berada di dua provinsi terdekat dengan pulau Jawa, yaitu Lampung (sisi barat) dan Bali (sisi timur). Karena kedekatan ini, maka dapat dipahami jika masjid di Lampung dan Bali dipengaruhi oleh masjid di pulau Jawa, apalagi populasi masyarakat muslim Jawa yang tinggal di Lampung dan Bali cukup tinggi. Masjid Darussalam versi lama di Kalimantan Tengah juga memiliki riwayat yang sama dengan masjid di Lampung dan Bali. Kalimantan Tengah adalah provinsi di Kalimantan yang terdekat dengan Pulau Jawa. perlu dicatat bahwa masjid provinsi di Jawa Tengah yang lama, yaitu Masjid Baiturrahman, juga memiliki atap pyramidal roof, bukan spherical dome.

Masjid Islamic Center Nurul Ulum dan Masjid Ukhuwwah kemungkinan tidak akan berubah di masa depan karena kedua masjid tersebut adalah bangunan baru dan Masjid Ukhuwwah berada di Kawasan non-muslim, memperluas masjid di Kawasan non-muslim dapat menimbulkan konflik sosial seperti yang terjadi di Jayawijaya Papua ketika masyarakat non-muslim memprotes perluasan masjid.

Penulis membagi tipe pyramidal roof spherical dome menjadi dua tipe yaitu tipe Timur Tengah dan tipe India. Tipe India adalah tipe spherical dome dengan ukuran 3/4 sphere, ukuran lainnya adalah tipe Timur Tengah kecuali yang berukuran 1/8 sphere. Tipe dome dengan ukuran 1/8 sphere adalah tipe terbaru yang umum digunakan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan tiang seperti pada masjid -i-tooba Karachi (Hasan, 2018) dan masjid provinsi Penang (Othman, Inangda, & Ahmad, 2009). Tujuan menghilangkan tiang pada bangunan masjid adalah untuk mendapatkan ruang sholat lebih besar (Asholat, 2016). Oleh karena itu, keberadaan masjid tanpa tiang dapat dianggap sebagai prestasi, seperti pada masjid Al Saffar karya Ridwan Kamil (Kami, 2019). Di sisi lain, Masjid Provinsi Al Falah, Jambi, justru menggunakan tiang sebagai identitas dengan julukan Masjid Seribu Tiang. Walaupun demikian, jumlah tiang sesungguhnya, adalah 256 buah.

Untuk hipotesis 3, penulis melakukan uji Fisher's Exact antara makna nama masjid dan status populasi muslim di suatu provinsi, mayoritas atau minoritas. Sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 1, nama masjid tidak langsung dapat dianalisis kecuali terlebih dahulu dibedakan antara mana yang merupakan nama dalam bahasa Arab netral, Arab asertif, dan bahasa Indonesia. Tabel 5 menunjukkan pembagian kategori nama masjid.

Tabel 5. Kategori Nama Masjid

Local Names	Arabic Neutral Names	Arabic Assertive Names
Masjid Provinsi (great mosque)	Sabilal Muhtadin (way for the guided people)	Al Falah (kemenangan)
Ahmad Yani (name of a national hero)	Baitul Izzah (worldly sky)	Al Fatah (kemenangan)
Masjid Agung (great mosque)	At Takwa (faithful)	Mujahidin (pejuang)
Masjid Islamic Center	Al Kautsar (nama sungai di surga)	Al Mashun (penjaga)
Masjid KH Hasyim Asy'ari (nama pahlawan Nasional)	Al Muna wwar (smart)	
Tuatunu (name of a village)	Baiturrahman (house of mercy)	
Masjid Gedhe Kauman (Moslem great mosque)	Hubbul Wathan (loving country)	
	Darussalam (safe country)	
	Nurul Ulum (light of knowledge)	
	Al Bantani (name of an ulema)	
	Baiturrahman (house of grace)	
	An Nur (light)	
	Al Akbar (great)	
	Al Ikhlas (sincere)	
	Ukhuwwah (brotherhood)	

Hasil analisis Fisher's exact test ditunjukkan pada Table 6. Nilai hasil analisis adalah signifikan ($p = 0,005 < 0,01$), menunjukkan kalau ada perbedaan penamaan pada tingkat provinsi dengan populasi mayoritas mutlak, mayoritas relatif, dan minoritas. Dari tabel dapat dilihat bahwa 13 dari 17 masjid diberi nama bahasa Arab netral berada di provinsi dengan mayoritas mutlak. Hal ini sesuai dengan hipotesis 3. Sementara itu, tiga dari empat masjid dengan Arab asertif berada di kawasan mayoritas relatif, hal ini juga sudah sesuai dengan hipotesis. Menariknya, ada 10 masjid dengan nama lokal, satu masjid berada di kawasan minoritas, sembilan masjid di kawasan mayoritas. Di sisi lain, di Kawasan minoritas, lebih banyak ditemukan masjid dengan nama Arab netral dibandingkan dengan nama local (4 dari 5). Hasil ini bertentangan dengan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa masjid di kawasan minoritas akan menggunakan nama lokal. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, hipotesis 3 hanya diterima sebagian.

Tabel 6. Tes untuk Hipotesis 3

	Islamic Denominantion			
	Minority	Relative Majority	Absolute Majority	
Neutral Arabic	4	0	13	17
Assertive Arabic	0	3	1	4
Local Names	1	0	9	10
Total	5	3	23	31
Fisher's Exact Test				
Exact.Sig (2-sided)	0,005			

Tiga fakta dimana masjid provinsi memiliki nama asertif pada kawasan relative majority adalah Masjid Provinsi Al Fatah di Maluku, Masjid Provinsi Mujahidin di Kalimantan Barat, dan Masjid Provinsi Al Mashun di Sumatera Utara. Al Fatah berarti kemenangan, sementara Mujahidin berarti para pejuang, dan Al Mashun berarti terjaga atau terlindungi dari serangan. Ketiganya memiliki makna asertif sekaligus berada di provinsi masyarakat Islam mayoritas relatif. Jumlah populasi Islam di Maluku 51%, di Kalimantan Barat 59% dan di Sumatera Utara 66%.

Di kawasan populasi minoritas, nama-nama masjid cenderung menggunakan nama Arab netral ketimbang nama lokal. Salah satu penjelasan yang logis adalah penamaan tersebut sebagai upaya untuk membangun kohesi internal daripada meminta penerimaan dari lingkungan sekitar. Contoh yang paling jelas adalah nama masjid provinsi di Bali yaitu Ukhuwwah, yang berarti persaudaraan. Walau begitu, makna ini kurang populer jika merujuk pada nama-nama masjid seperti Baiturrahman (house of mercy) di Papua, al Akbar (great) di Papua Barat, dan Nurussaadah (light of happiness) di East Southeast Islands. Nama-nama ini murni internal dan sekedar menandai keberadaan masjid di tengah penduduk non-muslim. Di sisi lain, hanya ada satu masjid dengan nama lokal, masjid Ahmad Yani, mencerminkan makna penghormatan kepada pahlawan. Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan nasional di Indonesia.

Sebagai rangkuman, temuan-temuan di atas sejalan dengan relasi arsitektur dengan politik. Arsitektur merupakan alat yang dapat diperankan untuk kepentingan apapun. Arsitektur dapat turut serta dalam kepentingan politik untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan baik pada lingkup administrasi atau lingkup sosial, baik disadari atau tidak disadari. peran arsitektur tersebut dapat diungkapkan dengan mengamati penanda dan petanda, denotasi dan konotasi, dan aspek-aspek semiologi lainnya dalam kehidupan manusia (Barthes, 1977).

Simpulan

Membangun teori semiotika ke dalam praktek arsitektur masjid yang terpisah secara geografis, penulis menguji beberapa hipotesis dan memprediksi bahwa kekuasaan akan berperan dalam keberadaan masjid-masjid provinsi di Indonesia. Hasilnya, kami memberikan dukungan umum untuk korelasi antara ukuran masjid dan populasi penduduk Islam di suatu provinsi (Hipotesis 1), masjid di kawasan etnis mayoritas akan mempertahankan ciri khas arsitekturnya (Hipotesis 2), dan nama masjid akan mencerminkan persaingan politik di suatu provinsi (Hipotesis 3). Secara spesifik, semakin besar jumlah dan proporsi muslim di suatu wilayah, semakin besar masjid yang dibangun. Semakin tinggi populasi etnis, semakin menonjol karakteristik etnis. Semakin seimbang kekuatan politik, semakin asertif simbolisme yang dilekatkan.

Dengan adanya temuan yang dilaporkan dalam artikel ini, menjadi mungkin bagi arsitek untuk merancang masjid yang baik dengan memahami karakteristik masyarakat lokal. Hal ini jika diabaikan, maka dapat membuat naluri konflik dan superioritas dapat masuk ke dalam desain masjid. Implikasi praktis ini jauh lebih operasional karena

masalah luas bangunan dan jumlah populasi sudah secara institusional diwajibkan dalam studi kelayakan masjid. Arsitek tinggal memilih nama dan desain yang memungkinkan masyarakat muslim memanfaatkan masjid dengan maksimal sementara masyarakat non-muslim menghargai keberadaan masjid sebagai salah satu karya arsitektur yang patut dibanggakan.

Temuan ini menawarkan implikasi teoritis karena hasil penelitian ini menunjukkan manfaat teori semiotika ketika mempelajari hubungan arsitektur dengan lingkungan sosio-politik. Sebagai contoh, walaupun penelitian ini gagal menunjukkan relasi nama lokal masjid dengan keberadaan masjid di lingkungan minoritas, secara umum penelitian ini mengungkapkan bahwa signifier memiliki peran dalam keberadaan masjid di lingkungan sosial-politiknya. Dengan demikian, lingkungan ketegangan antara kelompok sosial atau lingkungan dengan mayoritas mutlak dapat dilihat dari signifier yang digunakan, dimana nama masjid yang netral dapat ditemukan di kawasan mayoritas mutlak sementara nama masjid yang asertif dapat ditemukan di kawasan mayoritas relatif. Selain itu, masjid di lingkungan politik etnik utama dengan karakteristik khususnya, akan mempertahankan karakteristik khas tersebut di wilayahnya. Akan menjadi penting bagi penelitian selanjutnya untuk menentukan apakah konteks sosio-politik dimana masjid dibangun dapat pula tercermin dalam aspek lain dari arsitektur seperti tinggi menara, luas lapangan terbuka, bentuk busur (Jurco, Bodea, Crisan, & Scurtu, 2017), kaligrafi (Ory, 2001), atau penampilan masjid dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya.

Menarik pula untuk ditinjau lebih jauh mengenai pilihan spherical dome atau pyramidal roof pada kawasan minoritas vs mayoritas muslim. Penelitian Isin dan Siemiatycki (1999) menemukan bahwa ada makna ganda pada keberadaan spherical dome di Toronto. Di satu sisi, ia menandakan tantangan bagi masyarakat lokal karena spherical dome adalah sesuatu yang asing di lansekap kota. Di sisi lain, ada pula yang mengartikan keberadaan spherical dome sebagai simbol toleransi agama di Toronto. Dalam kasus penelitian sekarang, hanya ada satu masjid yang menggunakan pyramidal roof di kawasan non muslim, yaitu masjid Ukhuwwah di Bali. Selebihnya, di Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua, dan East Southeast Islands menggunakan spherical dome. Apakah keberadaan masjid Ukhuwwah menandakan intoleransi atautkah menandakan akulturasi? Apakah keberadaan masjid-masjid spherical dome di daerah lain menandakan tantangan bagi mayoritas atautkah mencerminkan toleransi? Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini.

Dengan adanya temuan yang dilaporkan dalam artikel ini, menjadi mungkin bagi arsitek untuk merancang masjid yang baik dengan memahami karakteristik masyarakat lokal. Hal ini jika diabaikan, maka dapat membuat naluri konflik dan superioritas dapat masuk ke dalam desain masjid. Implikasi praktis ini jauh lebih operasional karena masalah ukuran dan jumlah populasi sudah secara institusional diwajibkan dalam studi kelayakan masjid. Arsitek tinggal memilih nama dan desain yang memungkinkan masyarakat lokal muslim memanfaatkan masjid dengan maksimal sementara masyarakat lokal non-muslim menghargai keberadaan masjid dan memandangnya sebagai salah satu karya arsitektur yang dapat dibanggakan.

Implikasi-implikasi di atas harus ditafsirkan dengan melihat keterbatasan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan data dengan sampel kecil sehingga tidak memungkinkan generalisasi yang luas atau memungkinkan pemakaian analisis yang lebih ampuh. Sebagai contoh, adalah mungkin kalau kasus ini hanya terjadi pada masjid provinsi, tidak pada masjid agung atau masjid besar. Lebih lanjut, juga mungkin kalau pilihan nama atau desain tidak berada di tangan arsitek, tetapi di tangan orang yang berkuasa di pemerintahan daerah. Untuk memahami apakah isu ini turut berperan dalam analisis kami, penelitian selanjutnya perlu menggunakan sampel yang lebih besar dan turut menyertakan desain kualitatif dengan melakukan wawancara pada sejumlah arsitek yang membangun masjid-masjid tersebut.

Selain itu, semua masjid dalam penelitian ini berada pada tingkat kota tetapi memiliki status masjid provinsi. Padahal, ada banyak masjid lain di tingkat kabupaten dan bahkan kota yang sama, sehingga jamaah masjid yang datang kemungkinan besar hanya masyarakat sekitar masjid. Akibatnya, tidak menjadi jelas apakah masjid provinsi memang benar-benar mewakili masyarakat muslim di suatu provinsi dan juga dapat memberikan kesan tertentu pada masyarakat non muslim. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi lebih jauh masjid-masjid pada berbagai level dan derajat penerimaan masyarakat non-muslim terhadap masjid tersebut.

Daftar Pustaka

- Asholat. (2016). Hukum Mendirikan Shaf Shalat di Antara Tiang. Retrieved April 20, 2019, from <https://www.asholat.com/2016/05/hukum-mendirikan-shaf-shalat-di-antara.html>
- Azaryahu, M., & Kook, R. (2002). Mapping the nation : street names and Arab-Palestinian identity : three case studies. *Nations and Nationalism*, 8(2), 195–213.
- Barthes, R. (1977). *Elements of Semiology*. New York: Hill & Wang.
- Boender, W. (2018). Urban Islam in the Netherlands: What Mosques can tell. *Islamology*, 8(1), 26–42.
- Central Agency of Statistics. (2011). *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut (Population according to Area and Religion Adhered)*.
- Davies, N., & Jokiniemi, E. (2008). *Dictionary of Architecture and Building Construction*. Paris: Elsevier.
- de Saussure, F. (2011). *Course in General Linguistics*. New York: Columbia University Press.
- Falah, S. M. (2018). *The Shrine that Consumed Its Town : The Role of Religion and Politics in Reshaping the Iraqi City of Najaf*. University of Cincinnati.
- Fisher, R. A. (1954). *Statistical Methods for Research Workers*. Edinburgh: Oliver and Boyd.
- Grabar, O. (2001). Art and Architecture and the Qur'ān. In *Encyclopaedia of the Qur'ān : A-D* (pp. 161–175). Brill.
- Hasan, I. (2009). *Architecture and the Politics of Identity in Indonesia A Study of the Cultural History of Aceh*. University of Adelaide.
- Hasan, S. (2018). Minarets, alcoves, domes and devotion. Retrieved June 19, 2019, from <https://www.dawn.com/news/1411582>
- Indrawati, Soetomo, S., Setioko, B., Murtini, T. W., & Nurhasan. (2016). Edu-Religious Tourism Based on Islamic Architecture Approach: A Preliminary Research in Majasto Cemetery - Sukoharjo Regency, Central Java. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 656–663. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.129>
- Inis, E. F., & Siemiatycki, M. (1999). *Fate and Faith: Claiming Urban Citizenship In Immigrant Toronto* (No. 8). Toronto.

- Ismail, A. S., & Rasdi, M. T. M. (2010). Mosque architecture and political agenda in twentieth-century Malaysia. *The Journal of Architecture*, 15(2), 137–152. <https://doi.org/10.1080/13602361003791051>
- Jurco, A. N., Bodea, S. M., Crisan, H. G., & Scurtu, I. (2017). Method to Develop the Double-Curved Surface of the Roof. *JIDEG*, 12(1), 55–58.
- Kami, I. M. (2019). Desainnya Dituduh Illuminati, RK Tunjukkan Masjid-masjid Rancangannya. Retrieved June 19, 2019, from <https://news.detik.com/berita/d-4572366/desainnya-dituduh-illuminati-rk-tunjukkan-masjid-masjid-rancangannya>
- Kassim, D. H., Putra, A., Nor, M. J. M., & Muhammad, N. S. (2014). Effect of Pyramidal Dome Geometry on the Acoustical Characteristics in a Mosque. *Journal of Mechanical Engineering and Sciences*, 7, 1127–1133.
- Koskinen, I., & Hush, G. (2016). Utopian, Molecular and Sociological Social Design. *International Journal of Design*, 10(1), 65–71.
- Levy, M. Z., Barbu, C. M., Castillo-neyra, R., Quispe-machaca, V. R., Ancca-juarez, J., Escalante-mejia, P., ... Chagas Disease Working Group in Arequipa Peru. (2014). Urbanization , land tenure security and vector-borne Chagas disease. *Proceeding of the Royal Society B*, 281, 20141003.
- Ministry of Religion. (2019). Daftar Profil Masjid Raya (Great Mosques Profiles List). Retrieved July 26, 2019, from http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/?tipologi_id=2
- Nawawi, N. M., Kassim, S. J., & Ibrahim, M. (2018). The Mosque in a Multicultural Context: Modernity, Hybridity and Eclecticism. In S. J. Kassim & Pitt (Eds.), *Modernity, Nation and Urban-Architectural Form* (pp. 31–58). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-66131-5>
- Ndana, N. (2007). From Kalwinamaano through Mukavendiimi to Mbweene : Verbal Indirectness, Dog Names and Subiya Social Experience. *NAWA Journal of Language and Communication*, 1(2).
- Ory, S. (2001). Calligraphy. In *Encyclopaedia of the Qur'an: A-D* (pp. 278–286). Brill.
- Othman, R., Inangda, N., & Ahmad, Y. (2009). A typological study of mosque internal spatial arrangement : A case study on Malaysian mosques (1700-2007). *Journal of Design and the Built Environment*, 41–54.
- Prijotomo, J. (1996). When West Meets East : One Century of Architecture in Indonesia (1890s-1990s). *Architronic*, 5(3), 1–10.
- Sani, R. M. (2009). *An Inquiry into Iranian Architecture Manifestation of Identity, Symbolism, and Power in the Safavid's Public Buildings*. Eastern Mediterranean University.
- Taib, M., & Rasdi, M. T. (2012). Islamic Architecture Evolution : Perception and Behaviour. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 49, 293–303. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.07.027>

- Yacobi, H., Ventura, J., & Danzig, S. (2016). Walls, Enclaves and the (Counter) Politics of Design. *Journal of Urban Design*, 21(4), 481–494.
- Zhang, H., Chi, S., Yang, J., & Wang, T.-K. (2012). Efficient safety information retrieval on construction sites: a preliminary methodology. In *Proceedings of ICSDEC2012. Developing the Frontier of Sustainable Design, Engineering, and Construction*. Fort Worth, Texas.
- Zielstra, D., & Hochmair, H. H. (2013). Positional accuracy analysis of Flickr and Panoramio images for selected world regions. *Journal of Spatial Science*, 58(2), 251–273.